

Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pegawai: *Dysfunctional Behavior* Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas)

Sudjono, Dona Primasari, & Ratu Ayu Sriwulandari

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof.HR. Boenyamin No.708 Grendeng Purwokerto 53122 Telpn (0281) 637970
couprall@yahoo.com, dona_primasari@yahoo.com, ratu.ayuwulandari@gmail.com

ABSTRAK

This study examines the relationship of Information Financial Systems to Officer performance: *Dysfunctional Behavior* as Moderating Variable. This research represents the empirical test which used sensus sampling technics in data collection. Data were collected using a survey of 101 from officer in local government of Banyumas Center of Java, Indonesia. Data analysis uses SPSS ver.18. Result of hypothesis examination indicate that from two hypothesis raised are Accepted.. Accepted fist hypothesis: there are positive influence between implementation of Government Information Financial System (SIKD) to Officer performance. Second hypotesis there are positive influence between implementation of Government Information Financial System (SIKD) to Officer performance mediated by *dysfunctional behavior*.

Keywords: Government information financial system (SIKD), officer performance, *dysfunctional behavior*

ABSTRAK

Penelitian ini menguji hubungan efektivitas impementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SIKD) terhadap kinerja pegawai dengan *dysfunctional behavior* sebagai variabel moderating. Penelitian ini menggunakan teknik sensus samping dalam pengumpulan data. Data dikumpulkan dengang metode survey terhadap 101 pegawai pemerintah di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Analisis data menggunakan SPSS versi 18. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dari kedua hipotesis yang diajukan berhasil diterima. Hipotesis pertama bahwa terdapat pengaruh implementasi SIKD terhadap kinerja pegawai diterima. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *dysfuntional behavior* memoderasi secara negatif

pengaruh implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap kinerja Pegawai juga diterima
Kata kunci: Implementasi sistem informasi keuangan daerah, kinerja pegawai, *dysfuntional behavior*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, daerah diberikan wewenang yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kepada publik. Sejak tahun 2002 ditetapkan Kepmendagri 29/2002 yang mengacu pada PP Nomor 105 tahun 2000 dan UU Nomor 25 tahun 1999 mengenai pengimplementasian model struktur otoritas baru dan rancangan sistem informasi akuntansi yang baru di seluruh Indonesia. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber – sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi (Permendagri 13 tahun 2006). Sistem ini menggantikan sistem lama yang selama ini digunakan yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah diterapkan sejak tahun 1981. Implementasi dari Sistem Akuntansi keuangan daerah diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik (Mardiasmo,2002). Rintangan penting untuk tercapainya kesuksesan dari suatu implementasi sistem yang baru adalah kurangnya perhatian pada faktor perilaku selama implementasi. Selain itu masih sedikit penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan faktor–faktor perilaku selama tahap implementasi sistem baru serta pengaruh sistem tersebut terhadap kepuasan dan kinerja (Cavallozo dan Ittner, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Kaplan (1986), Scott (1994), Abernethy dan Lilis (2001), Cavaluzzo dan Ittner (2004), hanya memfokuskan pada masalah tingkatan organisasi dihubungkan dengan implementasi inovasi sistem dan menemukan fakta-fakta baru bahwa inovasi akuntansi manajemen tidak membantu meningkatkan pengambilan keputusan maupun kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Shield (1995), Gosselin (1997), McGowan dan Klammer (1997) meneliti kebijakan pelatihan karyawan dan struktur manajemen internal terhadap kesuksesan implementasi dan difusi dari *Management Accounting System* dan menemukan bahwa adanya kebijakan tersebut mendukung kesuksesan implementasi sistem.

Kesuksesan implementasi sebuah sistem tentu saja tak lepas dari perilaku individu pelaksana sistem tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Wiyantoro (2006) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan aktivitasnya sering kali terjadi suatu penyimpangan perilaku atau pelanggaran yang disengaja di luar dari aturan dan prosedur sistem pengendalian manajerial pemerintah daerah yang biasanya dilakukan oleh pelaksana SKPD itu sendiri yang disebut sebagai perilaku *dysfunctional (dysfunctional behavior)*. Penerapan SIKD yang efektif menuntut adanya pemahaman utuh dari pelaksana manajemen keuangan daerah dan adanya penyempurnaan secara terus menerus dari instansi yang berkewenangan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat menjadi kenyataan. Dengan adanya perilaku *dysfunctional (dysfunctional behavior)* tentu saja akan mempengaruhi negatif implementasi sebuah sistem (Sabaroyeen,2006).

Alasan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada penelitian di bidang Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keperilakuan, terutama penelitian terhadap pengaruh implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SIKD) terhadap hasil kerja (*Work outcomes*) dan pengaruhnya terhadap perilaku individu yang dalam hal ini adalah perilaku *dysfunctional (dysfunctional behavior)*.

Sesuai dengan latar belakang penelitian secara spesifik rumusan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah implementasi Sistem Informasi Keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja para pegawai aparat Pemda
2. Apakah perilaku *dysfunctional (dysfunctional behavior)* memoderasi pengaruh implementasi Sistem Informasi Keuangan daerah terhadap kinerja para pegawai aparat Pemda

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

Pendekatan Teori Kontinjensi

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hubungan antara Teori Kontinjensi dengan implementasi sistem. Premis dari Teori Kontinjensi adalah tidak terdapat sistem pengendalian yang secara universal selalu tepat untuk bisa diterapkan pada seluruh organisasi dalam setiap keadaan. Suatu sistem pengendalian akan berbeda-beda di tiap-tiap organisasi yang berdasarkan pada faktor organisatoris dan faktor situasional (Otley,1995). Dengan didasarkan pada pendekatan kontinjensi maka ada kemungkinan terdapat variabel penentu lainnya yang saling berinteraksi, selaras dengan kondisi tertentu yang dihadapi.

Penggunaan teori kontinjensi pada konsep kesesuaian dalam menunjukkan tingkat kesesuaian antara faktor-faktor konstektual (kontinjensi) dan sistem akuntansi manajemen

akan memungkinkan manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Riyanto, 2001). Menurut Otley (1980) organisasi menghadapi kondisional agar terbentuk konfigurasi yang sesuai sehingga diharapkan menghasilkan efektifitas organisasi dan peningkatan kinerja organisasi.

Hipotesis

Hubungan implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Kinerja

Implementasi suatu sistem mengakibatkan perubahan kondisi pada suatu organisasi. Pada kondisi seperti ini para pegawai dan manajer dituntut untuk mampu merespon perubahan-perubahan situasi lokal yang terjadi. Mereka harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pengaruh implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap kinerja para aparat pemda. Berdasarkan pasal 14 Bab III mengenai penyelenggaraann Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dikemukakan bahwa SIKD diselenggarakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Dengan adanya implementasi SIKD tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja para aparat pemda.

Mengacu pada penelitan Arbenethy (2005) apabila dikaitkan dengan implementasi SIKD maka diharapkan dengan adanya implementasi SIKD tersebut dapat meningkatkan kinerja para pegawai dalam hal ini aparat pemda, sehingga dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

H1: Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemda

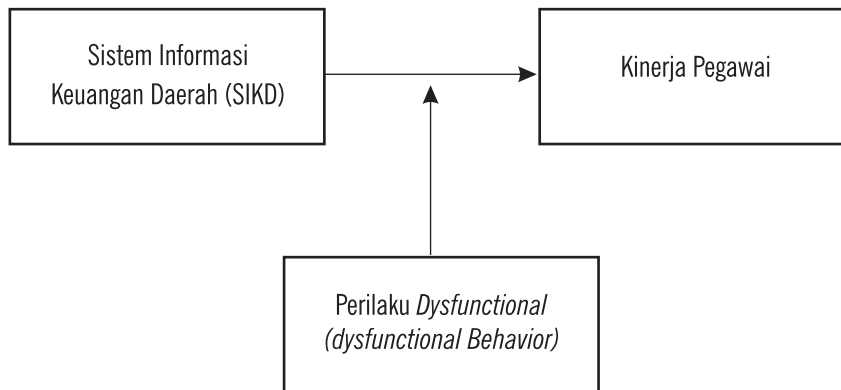
Hubungan implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), perilaku *dysfunctional* (*dysfunctional Behavior*) dan Kinerja

Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) tidak akan sukses jika tidak dibarengi dengan perilaku individu (pegawai) yang mendukung implementasi sistem tersebut. Menurut Jaworski dan Young (1992) perilaku *dysfunctional* dapat didefinisikan sebagai "suatu tindakan dimana dilakukan usaha yang kurang maksimal dengan memanipulasi elemen-elemen sistem pengendalian dengan tujuan yang dikehendaki. Logika nya implementasi suatu sistem terhadap kinerja tidak akan efektif bila dipengaruhi oleh faktor *dysfuntional behavior*. Mengacu pada penelitian Soobaroyen (2006) yang membuktikan bahwa *dysfuntional behavior* secara langsung berpengaruh negatif terhadap kinerja, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *dysfuntional behavior* memoderasi secara negatif pengaruh implementasi Sistem

Informasi Keuangan Daerah terhadap kinerja Pegawai

MODEL PENELITIAN



GAMBAR I. MODEL PENELITIAN

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para Pegawai Daerah yang di Kabupaten Banyumas. Adapun sampel yang digunakan terdiri atas aparat pemda yang terlibat dalam rekonstruksi rancangan dan penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) meliputi kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, kepala seksi, staff keuangan dan administrasi yang berkaitan dengan implementasi dan penggunaan SIKD di Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *sensus sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil semua sampel yang ada.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mail survey melalui penyebaran kuesioner dan mendatangi langsung wilayah sampel dalam penelitian yang dapat dijangkau (*personally administered questionnaire*). Bentuk kuesioner terdiri dari kuesioner dengan pertanyaan terkait (angket terstruktur).

PENGUKURAN VARIABEL

Variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Masih sedikit penelitian literatur akuntansi yang mengoperasionalkan diterimanya

(ditolaknya) inovasi MAS (*Management Accounting System*) oleh pihak manajer. Beberapa penelitian empiris Anderson (1995), Shields, (199), Krumwiede (1998) membahas perubahan MAS dengan cara menelaah tahap penerapan ABC (*Activity Based Costing*). Penelitian lainnya mengidentifikasi sejumlah perubahan yang terjadi dalam sistem akuntansi (Libby dan Waterhouse, 1996).

Penerimaan implementasi sebuah sistem merupakan suatu bentuk sikap, respon positif terhadap perubahan sistem yang ada (Arbenethy 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Arbenethy (2005) untuk mengetahui tentang bagaimana manajer produksi akan memberikan respon terhadap perubahan yang terjadi dalam MAS. Diterimanya implementasi SIKD diukur dengan mengembangkan instrumen pertanyaan yang digunakan Arbenethy (2005) yang terdiri atas tiga item pertanyaan menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5. Dengan skala 1 = sangat setuju hingga 5= sangat tidak setuju.

Kinerja Pegawai

Menurut (Kalbery,1995) dalam David (2001) kinerja manajerial diartikan sebagai evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan melalui atasan langsung, rekan kerja, diri sendiri dan bawahan langsung. Variabel kinerja diukur dengan menggunakan *self – rating* yang dikembangkan oleh Mahoney dan Carol (1963) dan telah banyak digunakan oleh peneliti-peneliti lain. Penggunaan *self – rating* dalam pengukuran kinerja untuk menghindari kemungkinan kerja yang tidak *representative* (Honeman,1997). Karena jika digunakan *superior rating* ada kemungkinan superior tersebut kurang memahami kondisi sebenarnya.

Pengukuran ini menggunakan sembilan item pertanyaan yaitu: pemilihan staff, perencanaan, pengawasan, perwakilan, investigasi, koordinasi, negosiasi, evaluasi dan kinerja secara keseluruhan. Ukuran kinerja diukur dengan skala likert satu sampai dengan lima. 1= jauh dibawah rata-rata, 2= sedikit dibawah rata-rata, 3= sama dengan rata-rata kinerja rekan anda, 4= sedikit diatas rata-rata dan 5= jauh diatas rata-rata.

Perilaku *Dysfunctional* (*dysfunctional behavior*)

Jaworski dan Young (1992) dengan lima skala likert yang secara keseluruhan menggambarkan perilaku *dysfunctional* dan skala itu menerima suatu tingkat kepuasan reabilitas (Cronbach Alpha – 0,72). Item yang original tersebut tetap jika produktivitasnya adalah konsisten (Frarry, 1996). Dalam penelitian ini pertanyaan kuesioner yang menyangkut perilaku *dysfunctional* menggunakan kuesioner hasil pengembangan Soobaroyen (2006), dengan 5 pertanyaan menggunakan 5 skala likert.

TEKNIK ANALISA DATA

Uji Kualitas Instrumen

Uji konsistensi internal (reliabilitas) ditentukan dengan koefisien *cronbach alpha*.

Suatu konstruk atau instrumen dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* di atas 0,60 (Nunnally, 1967 dalam Imam, 2005). Uji homogenitas data (validitas) dengan uji *person correlation*. Jika hasilnya signifikan maka data dikatakan valid.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Uji Asumsi Klasik

Sehubungan dengan penggunaan metode regresi berganda (*multiple regression*) maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdapat dalam regresi berganda sebagai berikut:

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen pada model regresi (Imam, 2002). Uji ini dapat melihat besaran nilai VIF dan *tolerance*. Pedoman yang digunakan untuk suatu model regresi yang bebas multikolonieritas adalah nilai VIF semua variabel independen dibawah nilai 10 dan nilai *tolerance* di atas 0,1 (Hair, 1998).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) (Imam, 2002). Uji ini dilakukan dengan melihat hasil Durbin Watson:

1. jika $d < d_L$ atau $d > (4 - d_U)$ maka terdapat autokorelasi.
2. jika d terletak antara d_U dan $(4 - d_U)$ maka tidak ada autokorelasi.
3. jika d terletak antara d_L dan d_U atau diantara $(4 - d_U)$ dan $(4 - d_L)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Imam, 2002).

Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada grafik plot (*scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terkait dengan residualnya.

Uji Hipotesis

Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan berganda sebagai model yang memprediksi hubungan kausal antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Regresi linear sederhana untuk menguji hubungan antara Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan kinerja pegawai dan menguji hubungan variabel moderating (*dysfunctional behavior*) dengan kinerja pegawai. *Moderated regression analysis* (MRA) digunakan untuk menentukan hubungan interaksi antara variabel oleh satu variabel sebagai variabel moderating (Nunnally, 1994). Persamaan statistika yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KP = a + b_1 \text{ SIKD} + e \quad (1)$$

$$PM = a + b_1 \text{ SIKD} + b_2 \text{ DB} + b_3 \text{ SIKD} * \text{DB} + e \quad (2)$$

Dimana:

KP = Kinerja Pegawai

SIKD = Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

DB = *Dysfunctional Behavior*

a = *intercept*

e = *error*

Jika variabel DB merupakan variabel moderator, maka koefisien b3 harus signifikan pada 0,05 atau 0,10.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Kuesioner disebarkan dengan cara melalui antar langsung kepada responden. Kuesioner diinggal kemudian diambil kembali sesuai dengan janji yang telah disepakati dengan responden. Waktu yang diperlukan untuk pengumpulan data selama 1 bulan dimulai dari 5 Juni 2013 sampai dengan 27 Juni 2013. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 145 kuesioner dan yang dikembalikan sejumlah 113 kuesioner, dengan tingkat respon rate sebesar 77,9%. Sebanyak 12 kuesioner tidak dapat diikutsertakan dalam analisis karena pengisian yang tidak lengkap, oleh karena itu jumlah data yang bisa diolah untuk analisis adalah sebanyak 101 kuesioner. Secara lengkap data akan disajikan dalam tabel 1 berikut ini:

TABEL I. RINCIAN PENGIRIMAN PENGEMBALIAN KUESIONER

Keterangan	Jumlah Kuesioner
Kuesioner yang didistribusikan	145 kuesioner
Kuesioner yang diterima (kembali)	113 kuesioner
Kuesioner yang tidak kembali	32 kuesioner
Kuesioner yang gugur (tidak lengkap pengisiannya) sehingga tidak dapat diolah	12 kuesioner
Kuesioner yang lengkap	101 kuesioner
Tingkat pengembalian (respon rate)	$(113/145) * 100\% = 77,9\%$
Tingkat pengembalian yang bisa digunakan	$(101/145) * 100\% = 69,6\%$

Sumber: Data diolah, 2013

Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden dapat dilihat pada tabel 2.

TABEL 2. PROFIL RESPONDEN

Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Pria	68	67,3%
Wanita	33	32,7%
Pendidikan		
D3	11	10,8%
S1	76	75,2%
S2	12	11,8%
S3	2	1,9%
Lama bekerja		
Dibawah 3 tahun	34	43,9%
Diatas 3 tahun	67	56,1%

Sumber: Data diolah, 2013

Uji Kualitas Instrumen

Uji kualitas data meliputi realibilitas dan uji validitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji *cronbach alpha* menggunakan SPSS. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* >0,60 (Nunnally, 1967 dalam Imam, 2005). Hasil secara lengkap uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 2 SPSS. Berikut ini adalah rekapitulasi hasil uji reliabilitas dan validitas yang disajikan pada tabel 3 dan tabel 4.

TABEL 3. HASIL UJI RELIABILITAS

NO	VARIABEL	NILAI <i>CRONBACH ALPHA</i>	KETERANGAN
1	Sistem Informasi Keuangan Daerah	0,683	Reliabel
2	Dysfunctional behavior	0,861	Reliabel
3	Kinerja Pegawai	0,924	Reliabel

Sumber: data primer diolah 2013

TABEL 4. HASIL UJI VALIDITAS

No	Variabel	Kisaran Korelasi	Signifikansi	Keterangan
1	Sistem Informasi Keuangan Daerah	0,760** -0,809**	0,001	Valid
2	Dysfunctional behavior	0,725** -0,898**	0,001	Valid
3	Kinerja Pegawai	0,677** -0,787**	0,001	Valid

Sumber: data primer diolah 2013

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data menunjukkan besar nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1,101 dan signifikan pada 0,177 yang berarti H_0 diterima yaitu data residual terdistribusi secara normal.

Uji Asumsi Klasik

Sehubungan dengan penggunaan metode regresi berganda (*multiple regression*) maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdapat dalam regresi berganda sebagai berikut:

Uji Multikolonieritas

Hasil perhitungan nilai *Tolerance* juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya > 95%. Hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10. jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

TABEL 5. HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS

Variabel	Nilai t	Sig	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
SIKD	5.466	.000	.879	1.137
DB	-.118	.048	.879	1.137

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,150, nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan nilai signifikansi 0,01, jumlah sampel 101 (jumlah sampel 101 karena kurang dari 150 lebih mendekati pada 100) dan jumlah variabel independen 2 ($k=2$) maka diperoleh nilai d_L sebesar 1,503 dan d_U sebesar 1,583. Jadi dapat dikatakan bahwa DW 1,150 lebih kecil dari batas atas (d_U) 1,583 dan kurang dari $4-1,503$ ($4- d_U$), sehingga dapat diartikan bahwa terdapat autokorelasi positif. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu.

TABEL 6. HASIL UJI AUTOKORELASI

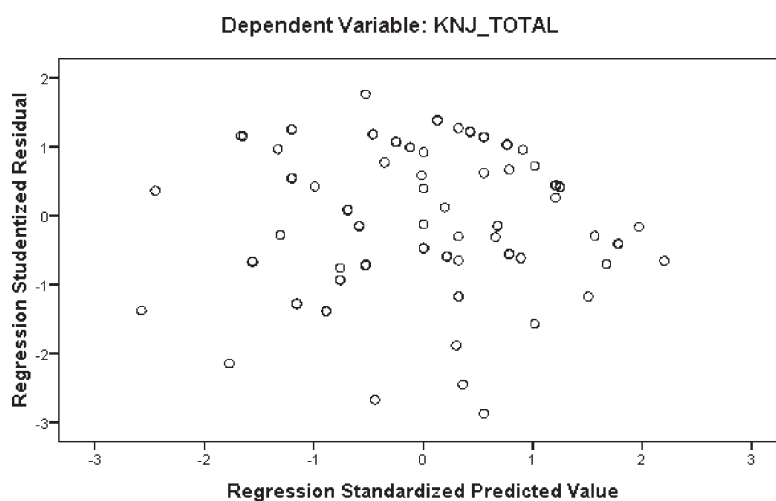
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of	Durbin Watson
1		.234	.218	5.776	1.150

Sumber: data primer diolah 2013

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil grafik plot (*scatterplot*) menunjukkan bahwa tidak terdapat pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi.

Scatterplot



Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang dirumuskan sebelumnya.

Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai (H1)

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan melihat interaksi antara variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Kinerja Pegawai (persamaan 1). Adapun hasil

pengujian menunjukkan besarnya *adjusted R²* adalah 0,194, hal ini berarti 19,4 % variasi Kinerja Pegawai dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah, sedangkan sisanya 80,6% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model. Dari model regresi tampak variabel informasi akuntansi signifikan pada 0,05, hal ini berarti bahwa variabel Kinerja Pegawai dipengaruhi oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Dysfunctional behavior memoderasi secara negatif pengaruh implementasi Sistem Informasi Keuangan daerah terhadap kinerja Pegawai (H2).

Pengujian hipotesis 2, dilakukan dengan uji interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Hasil pengujian hipotesis 2 dapat dilihat pada lampiran yang menunjukkan variabel interaksi yang merupakan interaksi antara Sistem Informasi Keuangan daerah dan *dysfunctional behavior* juga signifikan. Hasil output SPSS terlihat jelas bahwa variabel interaksi memberikan koefisien -0.037 dan signifikan pada 0.0000 yang berarti variabel *dysfunctional behavior* adalah pure moderator atau variabel moderating..

Ringkasan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 7 dan 8.

TABEL 7. RINGKASAN HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS I

Hipotesis	Adjusted R Square	Uji Signifikansi Simultan		Uji Signifikansi Parameter		Keterangan
		F	Sig	t	Sig	
H1 SIKD - KNJ	0,194	-	-	8,782	0,000	Berpengaruh

TABEL 8. RINGKASAN HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 2

Hipotesis	Adjusted R Square	Unstandardized Coefficients		Uji Signifikansi Parameter		Keterangan
		B	Std. Error	t	Sig	
H2	0,229					
SIKD		2.105	.447	4.710	.000	Berpengaruh
INTERAKSI		-.037	.016	-2.336	.022	Berpengaruh

TABEL 9. HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

	Hipotesis	Keterangan
H1	Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai	Diterima
H2	<i>Dysfunctional behavior</i> memoderasi secara negatif pengaruh implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pegawai.	Diterima

PEMBAHASAN

Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai

Suatu sistem yang terimplementasi dengan baik dapat memberikan informasi yang relevan terhadap pengambilan keputusan oleh pegawai karena informasi memberikan para pegawai prediksi yang lebih akurat tentang keadaan lingkungan pekerjaan, sehingga mampu menghasilkan sebuah pengambilan keputusan alternatif yang lebih baik dengan rangkaian tindakan efektif dan efisien dan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai. Selain itu informasi yang komprehensif dari suatu sistem informasi akan memberikan informasi yang lebih spesifik dan relevan untuk proses pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan Kinerja (Hall,2004).

Dalam lingkungan pmda penerimaan implementasi SIKD akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya. Konsekuensi penerimaan implementasi SIKD dapat membantu pekerjaan lebih efisien selaras dengan kesesuaian tugas, sehingga disimpulkan bahwa penerapan SIKD akan meningkatkan kinerja. Menurut Hunton (1997) penggunaan sistem informasi akan meningkatkan kinerja manajerial. Penerimaan implementasi sistem akan membantu para pegawai dalam melaksanakan kegiatan operasional kerja mereka, para pegawai cenderung akan memberdayakan implementasi sistem semaksimal mungkin sehingga secara otomatis akan meningkatkan kinerja mereka. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Arbenethy dan Jan Bouwens (2005).

Dysfunctional behavior memoderasi secara negatif pengaruh implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pegawai

Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) tidak akan sukses jika tidak dibarengi dengan perilaku individu (pegawai) yang mendukung implementasi sistem tersebut. Menurut Jaworski dan Young (1992) perilaku *dysfunctional* dapat didefinisikan sebagai "suatu tindakan dimana dilakukan usaha yang kurang maksimal dengan memanipulasi elemen-elemen sistem pengendalian dengan tujuan yang dikehendaki. Logikanya implementasi suatu sistem terhadap kinerja tidak akan efektif bila dipengaruhi oleh faktor *dysfunctional behavior*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui *dysfunctional behavior* adalah pure moderator atau variabel moderating. *Dysfunctional behavior* memoderasi secara negatif pengaruh implementasi Sistem Informasi Keuangan daerah terhadap kinerja Pegawai. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Soobaroyen (2004) dan Wiyantoro (2006) yang membuktikan bahwa *dysfunctional behavior* secara langsung berpengaruh negatif terhadap kinerja.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini berlatar belakang pada pentingnya implementasi Sistem Informasi

Keuangan Daerah dalam penilaian prestasi seseorang dalam hal ini pegawai SKPD Kabupaten Banyumas dimoderasi oleh *Dysfunctional behavior*. Hasil penelitian mendukung bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap kinerja pegawai SKPD Kabupaten Banyumas dan mendukung variabel *Dysfunctional behavior* memoderasi Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap kinerja pegawai, dengan kata lain disebut sebagai variabel moderating. Penelitian ini memberikan indikasi pentingnya implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen dan menilai prestasi seseorang.

Keterbatasan Penelitian

Evaluasi atas hasil penelitian ini harus mempertimbangkan beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, antara lain:

1. Kehandalan validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini nampak belum teruji dengan baik, karena terdapat beberapa indikator yang dieliminasi (validasi) meskipun telah dilakukan *pilot study*. Peneliti menduga kemungkinan adanya faktor lain yaitu penerjemahan yang kurang baik, terutama *setting* bahasa yang sesuai dengan kondisi responden di Indonesia.
2. Penggunaan instrumen berupa persepsi akan menimbulkan masalah jika persepsi tersebut berbeda dengan keadaan sebenarnya.
3. Penggunaan self rating pada pengukuran kinerja pegawai dapat menyebabkan adanya kecenderungan para responden mengukur kinerja mereka lebih tinggi daripada yang sebenarnya, sehingga penpenilaian kinerja cenderung menjadi lebih tinggi.

Saran

Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka dikemukakan beberapa dalam penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di perusahaan manufaktur, dimana karakteristik objek di pemerintahan berbeda dengan perusahaan manufaktur.
2. Perlu dilakukan pengembangan instrument yaitu disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan dari objek yang diteliti.
3. Penggunaan self rating pada pengukuran kinerja pegawai dapat diperbaiki dengan mengacu pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dengan melibatkan responden pihak lain untuk menilai kinerja rekannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abernethy, M. A., and A. M. Lillis, (2001), 'Interdependencies in Organization Design: A Test in Hospitals', *Journal of Management Accounting Research*, Vol. 13.
- Abernethy, M. A., and Jan Bouwens, (2005), 'Determinants of accounting innovation', *ABACUS*.

- Aghion, P., and J. Tirole, (1994), 'Formal and Real Authority in Organizations', *Journal of Bolton, P., and M. Dewatripont, 'The Firm as a Communication Network', Quarterly Journal of Economics, Vol. 109, No. 4.*
- Anderson, S.W., (1995), "A frame work for assessing cost management system changes. The case of activity based costing implementation at general motors'. *Journal of management accounting research. Vol. 71.*
- Ayu Oktaviani, (2003), *Desentralisasi Pengambilan Keputusan, Pengendalian Akuntansi dan Kinerja Kantor Dinas, Program studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang.*
- Cavalluzzo, K. S., and C. D. Ittner, (2004), "Implementing Performance Measurement Innovations: Evidence From Government". *Accounting, Organizations and Society, Vol. 29, Nos 3-4.*
- David Efendi, (2001), "Pengaruh Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajer Dengan Ketidakpastian Tugas Sebagai Variabel Moderating", *Tesis Magister Sains Akuntansi Undip Semarang (Tidak Dipublikasikan).*
- Chenhall, R.H., (2003), "Management Control Systyems Design within its Organazional Contex: Findings from Contijency-based Reseach and Directions for the Future", *Accounting, Organizations and Society 28:127-168.*
- Ghozali, Imam, (2001), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.*
- Gosselin, M., (1997), "The effect of strategy and organizational structure on the adoption and implementation Activity Based Costing", *Accounting Organization and Society. Vol.22 No.2.*
- Govindrajn, V., (1986), "Impact of Participation in the Budgetary Process on Managerial Attitudes and Performance: Universalistic and Contigency Perspectives". *Decision Sciences 17:496-516.*
- Hall, R., (1978), *Organizations: Structure and Process, Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall.*
- Honeman, C.T., (1997), "Introduction to managerial performance", *Prentice Hall.*
- Hall, M., (2004), "The effect of Comprehensive Performance Measurement Systems on Role Clarity, Psychological, Empowerment and Managerial Performance", *Global Management Accounting Research Symposium, Available on www, ssrn.com.*
- Hunton, J. E., and Price, K. H., (1997), "Effects of the User Participation Process and Task Meaningfulness on Key Information System Outcomes", *Management Science, Vol. 43, No. 6.*
- Krumwiede, K.R., (1995), "The implementation stage of Activity Based Costing and the impact of contextual and organizational factor", *Journal of Management Accounting Research. Vol.33.*
- Libby,T. and J.H. Waterhouse, (1996), "Predicting change ini management accounting system", *Journal of management accounting research. Vol.8.*
- Jaworski, B.J., and S.M. Young, (1992), "Dysfunctional Behavior and Management Control: An Empirical Study of Marketing Managers", *Accounting, Organizattion and Society 17 (1): 17-35.*
- Josept G. Fisher, (1998), "Contigency Theory, Management Control Systems and Firm Outcomes: Past Result and Future Directions". *Behavior Research in Accounting, 10, 47-64.*
- Kaplan, R. S., (1986), "Accounting Lag: The Obsolescence of Cost Accounting Systems", *California Management Review, Vol. 28, No. 2.*
- Mardiasmo, (2002), "Akuntansi sektor publik", *Andi Yogyakarta.*
- Macintosh,N.B., (1994), "Management accounting and control system", *Jhon Willey and sons.*
- McGowan, A.S., and T.P. Klamme, (1997), " Statisfaction with Activity Based Management Implementation". *Journal of Management Accounting Research. Vol.9.*
- Otley, D., (1995), "Management control, organization design and accounting information system", *UK: Prentice Hall.*
- Primasari Dona, Isbandriyati Mutmainah, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dengan tiga variabel moderating (studi empiris pada BPR se Kabupaten Bogor)". *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan (JRAK) Universitas Muhammadiyah Malang.*

- Primasari, Waspodo, Rahman, (2008), *Variabel Anteseden dan Konsekwensi Impementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Studi Empiris pada BAKORWIL IV Propinsi Jawa Tengah, SNA 11*. Pontianak.
- Riyanto, Bambang, (2001), *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh, Yogyakarta: BPFE.
- Scott, S. G., and R. A. Bruce, (1994), "Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the Workplace". *Academy of Management Journal*, Vol. 37, No. 3.
- Shields, M. D., (1995), "An Empirical Analysis of Firms' Implementation Experiences With Activity-Based Costing". *Journal of Management Accounting Research*, Vol.7.
- Wiyantoro, Lili Sugeng, (2006), *Hubungan antara sistem pengendalian manajemen dengan perilaku dysfunctional: budaya nasional sebagai variabel moderating*. Tesis. Program studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasikan